



Disdik-PUPR Koleksi Temuan BPK Terbanyak

**Pemkab Minut
Tetap Optimis Raih WTP**

Editor : **Jendry Dahar (UKW 21411)**

MINUT—Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, bakal diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada 15 Mei mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut Sulawesi Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati

Joune Garnda (JG) dan Wakil Bupati Kevin Wolulang (KW) optimis, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diperolehi. Meskipun diketahui, ada sejumlah temuan yang didapat para auditor BPK saat turun lapangan.

Sebagaimana prediksi banyak pihak, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk per-

baikan infrastruktur secara swakelola di sekolah-sekolah jajarannya Dinas Pendidikan Minut, menjadi salah satu yang paling disorot BPK.

Hal itu diakui Kepala Inspektoriat Pemkab Minut Stephen Tuwaidan. Dijelaskannya, ada beberapa poin yang menjadi atensi BPK telah ditindaklanjuti. Sehingga kini, tersedia empat proyek yang berpotensi diantisipasi menjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). "Tersisa yang di Desa Jaribun, Tontale dan dua di Desa Kema Satu di sekolah St Xavevirus dan TK



Dharmawanita Terbit, namanya kepada Manado Post, kemarin. Selain itu, diberikannya

Kami tetap optimis bisa meraih WTP. Melihat temuan-temuan yang tidak berdampak besar dalam penetapan opini. Itu berdasarkan komunikasi dan pemeriksaan final dengan para auditor.

Stephen Tuwaidan
Kepala Inspektoriat Minut

tersebut paling besarnya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yakni

proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). "Pada pelaksanaan tidak sesuai regulasi menurut BPK. Tapi karena itu melibatkan pihak ketiga, sehingga kami langsung meminta pertanggungjawaban pihak tersebut," bebernya.

Tindak lanjut dari semua temuan auditor BPK sudah dilakukan. Beberapa di antaranya akan ditindaklanjuti usai penyerahan LHP. "Ada yang selesai dan ada memang yang tidak bisa lagi, seperti DAK swakelola itu. Jadi ada beberapa proyek di sekolah-sekolah yang

jadi temuan itu, pokonya yang telah menerima pembayaran harus mengembalikannya.

Kini pihaknya menunggu penyerahan LHP dari BPK. Sebenarnya direncanakan. Selasa (9/5) lalu. Namun karena Gubernur Sulut sedang tugas di luar daerah, sehingga ditunda. Senin (15/5) pekan depan. "Kami tetap optimis bisa opini WTP. Karena menilai temuan-temuan sisi tidak berdampak besar dalam penetapan opini. Itu berdasarkan komunikasi dan pemeriksaan final dengan para auditor," tukasnya. (*)